

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Asas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Di sinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Tingkat pemerintah Kabupaten disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 ini disusun sehubungan dengan komponen yang keempat dari Sistem AKIP, yaitu pelaporan kinerja. Sebagai sebuah laporan kinerja, LAKIP ini amat penting artinya sebagai salah satu indikator penilaian laporan pertanggungjawaban Bupati di depan sidang DPRD, di samping juga sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

1.1 GAMBARAN UMUM

1) Geografis

Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Makale dengan total luas wilayah tercatat 213.188,69 Ha. Kabupaten Tana Toraja terletak antara 2°-3° Lintang Selatan dan 119° - 120° Bujur Timur, yang berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Toraja Utara
- Selatan : Kabupaten Pinrang dan Kab. Enrekang
- Barat : Propinsi Sulawesi Barat
- Timur : Kabupaten Luwu

Kabupaten Tana Toraja dilewati oleh salah satu sungai terpanjang yang terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu sungai Saddang. Jarak Ibukota Kabupaten Tana Toraja dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 km yang melalui Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

2) Demografi

Selama kurun waktu 2016-2020 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tana Toraja melambat dari 0,53 persen menjadi 0,51 persen sampai Tahun 2019 (Survey Penduduk 2010), tetapi pada Tahun 2020 meningkat menjadi 2,34 persen. Namun jumlah penduduk secara absolut bertambah dari 230.195 jiwa pada Tahun 2016 menjadi 280.794 jiwa di Tahun 2020.

Populasi penduduk Kabupaten Tana Toraja terdistribusi ke 19 Kecamatan, dimana pada Tahun 2020 Kecamatan Makale yang merupakan ibukota kabupaten memiliki jumlah penduduk

terbanyak yaitu 13,82 persen dari total populasi diikuti oleh Kecamatan Mengkendek 12,96 persen dan Kecamatan Rembon 8,78 persen. Kecamatan dengan proporsi penduduk terkecil yakni Kecamatan Rano 2,72 persen, Kecamatan Kurra 2,64 persen, dan Kecamatan Mappak 2,50 persen.

Dari sisi kepadatan penduduk di Tahun 2020, Kabupaten Tana Toraja mencatatkan tingkat kepadatan penduduk 137 jiwa per km², artinya setiap 1 km² wilayah Kabupaten Tana Toraja hanya dihuni oleh 137 jiwa. Secara spesifik terdapat 10 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi yaitu Kecamatan Makale 269 jiwa, Kecamatan Makale Utara 560 jiwa, Kecamatan Sangalla Utara 323 jiwa, Kecamatan Makale Selatan 269 jiwa, Kecamatan Rantetayo 242 jiwa, Kecamatan Sangalla 220 jiwa, Kecamatan Gandang Batu Silanan 212 jiwa, Kecamatan Sangalla Selatan 200 jiwa, Kecamatan Mengkendek 185 jiwa. Sementara tiga kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk rendah yakni Kecamatan Mappak 42 jiwa, Kecamatan Simbuang 41 jiwa, dan Kecamatan Bonggakaradeng 39 jiwa. Kecamatan tersebut memiliki jarak cukup jauh dai ibukota kabupaten dan jumlah penduduknya relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya.

3) Wilayah Administrasi

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023, secara administratif terbagi atas 19 Kecamatan, 47 kelurahan, dan 112 desa dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Tana Toraja*

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1.	Bonggakaradeng	1	5
2.	Simbuang	1	5

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
3.	Rano	-	5
4.	Mappak	1	5
5.	Mengkendek	4	13
6.	Gandang Batu Sillanan	3	9
7.	Sangalla	2	3
8.	Sangalla Selatan	1	4
9.	Sangalla Utara	2	4
10.	Makale	14	1
11.	Makale Selatan	4	4
12.	Makale Utara	5	-
13.	SaluPutti	1	8
14.	Bittuang	1	14
15.	Rembon	2	11
16.	Masanda	-	8
17.	Malimbong Balepe	1	5
18.	Rantetayo	3	3
19.	Kurra	1	5
Jumlah / Total		47	112

Sumber data: BPS Kabupaten Tana Toraja

4) Sektor Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tana Toraja tahun 2022 berdasarkan harga berlaku adalah Rp 8.757,44 Milliar dan cenderung mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 8.087,09 Milliar. Sektor pertanian menyumbang PDRB terbesar sebesar 22,30% diikuti sektor perdagangan, reparasi kendaraan 19,25% dan

konstruksi 12,92%. Sedangkan PDRB Tana Toraja Tahun 2022 atas dasar harga konstan 2023 sebesar 5.025,78 miliar rupiah.

*Tabel 1.2
Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2019 - 2022*

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022
Pertanian	1049,56	1039,75	1105,43	1110,52
Pertambangan dan Penggalian	59,84	58,78	59,54	62,17
Industri Pengolahan	343,52	327,73	352,25	385,30
Pengadaan Listrik dan Gas	8,18	8,58	9,22	10,90
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,38	5,75	5,98	6,40
Konstruksi	539,02	521,49	535,69	552,62
Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	89,16	870,28	944,99	1031,81
Transportasi dan Pergudangan	111,03	100,01	111,64	130,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	68,40	62,35	66,96	78,41
Informasi dan Komunikasi	256,52	286,88	306,71	318,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	222,64	226,75	243,94	275,29
Real Estate	373,67	408,98	424,65	468,15
Jasa Perusahaan	6,21	6,06	6,45	7,03
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	670,50	678,77	647,03	646,50
Jasa Pendidikan	417,18	443,52	463,12	496,59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	220,82	251,95	273,73	302,71
Jasa Lainnya	158,89	147,18	160,75	176,40
Total	7479,77	7571,14	8087,09	8757,44

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja

5) Sektor Sosial Budaya

a. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Karena itu pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah melakukan berbagai program dalam rangka lebih meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan dan mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi. Diantaranya dengan berusaha menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai secara berkesinambungan. Sarana di bidang pendidikan Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2018 masing-masing tercatat SD/MI 230 unit dengan jumlah guru 2.119 orang dan murid 30.282 orang; SLTP/MTs 89 unit dengan jumlah guru 1.189 orang dan murid 16.909 orang; dan SMU/SMK/MA 51 unit dengan jumlah guru 952 orang dan murid 14.602 orang, dan 6 unit perguruan tinggi.

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan. Jaminan kesehatan yang semakin baik akan menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas.

Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tana Toraja berusaha menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang dapat menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat Tana Toraja. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2018 terdiri dari 3 unit Rumah Sakit yang terdiri dari 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 2 Rumah Sakit Swasta, 22 unit Puskesmas, 326 unit Posyandu dan 99 unit Polindes. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2018 sebanyak 708 Orang.

c. Pertumbuhan Rumah tangga

Jumlah rumah tangga keluarga pada tahun 2023 adalah sebanyak 52.804 Rumah tangga, naik sebanyak 296

rumah tangga atau sebesar 0,56 % dari tahun 2017 sebanyak 52.804 rumah tangga.

6) Sektor Insfrastruktur

a. Pertambangan

Secara umum, lokasi penggalan di Kabupaten Tana Toraja hampir merata di setiap Kecamatan, utamanya penggalan tanah liat karena daerahnya berbukit sehingga bahan materialnya masih sangat banyak utamanya tanah liat dan batu gunung demikian juga batu sungai dan pasir.

Untuk distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto seri 2010 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2018 dari sektor pertambangan adalah 1,39%, dan untuk laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto seri 2010 atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha pada Tahun 2018 dari sector pertambangan adalah 6,80%.

b. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Persentase jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2016 adalah 50,62 persen, meningkat pada tahun 2020 menjadi 69,27 persen. Itu artinya masih ada 30,73 persen jalan yang belum baik.

Sedangkan Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 0,48 km/jiwa berkurang dari tahun 2016 yaitu 0,58 km/jiwa. Hal ini terjadi karena adanya penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja hanya 230.195 jiwa bertambah menjadi 280.794 jiwa pada tahun 2020. Pertambahan jumlah penduduk ini tidak diiringi dengan penambahan panjang jalan. Total panjang jalan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 statis yaitu 1.346,32 km.

c. Irigasi

Persentase irigasi Kabupaten Tana Toraja dalam kondisi baik sampai pada tahun 2020 adalah 81,15 persen. Sedangkan pada tahun 2016 persentase irigasi dalam kondisi

baik hanya 72,03 persen. Artinya persentase irigasi yang baik sampai tahun 2020 di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan. Jumlah ini bertambah oleh karena adanya perubahan lahan kering menjadi lahan sawah.

d. Listrik dan Gas

Kategori pengadaan listrik dan gas berkontribusi sebesar 0,12 persen terhadap perekonomian Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2018. Untuk Kabupaten Tana Toraja Dari segi kelistrikan daya yang terpasang 58.000.000 KW, produksi listrik 48.022.798 KWh, listrik terjual 41.491.819 KWh, dipakai sendiri 46.849 KWh dan untuk susut/hilang 5.294.124 KWh.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah melakukan restrukturisasi organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang telah dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, dan perlu ditata kembali sehingga perangkat daerah secara efektif dan efisien dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi urusan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik. Sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 01 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

- 2) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 02 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja.
- 3) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tana Toraja.
- 4) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja.
- 5) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 05 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
- 6) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja.
- 7) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 07 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja.
- 8) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 08 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja.
- 9) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja.
- 10) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja.
- 11) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja.

- 12) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja.
- 13) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Parawisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja.
- 14) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja.
- 15) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja.
- 16) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja.
- 17) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja.
- 18) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
- 19) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja.

- 20) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja.
- 21) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja.
- 22) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- 23) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- 24) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Toraja.
- 25) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- 26) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
- 27) Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan peraturan-peraturan daerah tersebut, telah ditetapkan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, 17 Dinas Daerah, 4 Badan, 19 Kecamatan dan 47 Kelurahan. Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja. Kewenangan dan tugas dari masing-masing organisasi adalah :

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah mencakup :

- (1). pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- (2). pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- (3). pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- (4). pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
- (5). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- (1). Sekretaris Daerah
- (2). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a) Bagian Pemerintahan.
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - c) Bagian Hukum.
- (3). Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan
 - c) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Terdiri dari:
 - Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4). Asisten Administrasi Umum

- a) Bagian Organisasi
 - b) Bagian Umum terdiri dari:
 - Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian.
 - Subbagian Rumah Tangga.
 - Subbagian Perlengkapan.
 - c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:
 - Subbagian Protokol.
 - d) Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:
 - Subbagian Keuangan.
- (5). Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD dan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- 1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 4) penyediaan dan pengkoordinasian Sekretariat DPRD dan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 5) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya
- 6) pembinaan administrasi yang terdiri dari urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun struktur organisasi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretaris
- 2) Bagian Umum dan Protokoler terdiri atas:
 - Subbagian Umum
 - Subbagian Perjalanan dan Protokoler
 - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
- 3) Bagian Perundang-undangan dan Persidangan
- 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:
 - Subbagian Keuangan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

3) Dinas-Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu.

Jumlah dinas yang ada di Kabupaten Tana Toraja ada 18 dengan rincian sebagai berikut :

- (1). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- (2). Dinas Kesehatan
- (3). Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
- (4). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (5). Dinas Perhubungan
- (6). Dinas Sosial
- (7). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
- (8). Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
- (9). Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- (10). Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- (11). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- (12). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- (13). Dinas Komunikasi, Informatika dan Kearsipan
- (14). Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- (15). Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- (16). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- (17). Dinas Lingkungan Hidup
- (18). Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

4) Badan – Badan dan Inspektorat

Badan sebagai Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan-Badan Daerah di Kabupaten Tana Toraja berjumlah 5 badan, 1 inspektorat dan 1 RSUD dengan rincian sebagai berikut :

- (1). Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- (2). Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- (3). Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- (4). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A
- (5). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- (6). Inspektorat
- (7). RSUD Lakipadada

5) Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi kecamatan terdiri atas :

- (1). Camat;
- (2). Sekretariat;
- (3). Seksi Pemerintahan;
- (4). Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- (5). Seksi Sosial Budaya
- (6). Seksi Pembangunan;
- (7). Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

(8). Kelompok Jabatan Fungsional;

Jumlah kecamatan di Kabupaten Tana Toraja ada 19 kecamatan dengan, rincian sebagai berikut :

- (1). Kecamatan Bonggakaradeng
- (2). Kecamatan Simbuang
- (3). Kecamatan Rano
- (4). Kecamatan Mappak
- (5). Kecamatan Mengkendek
- (6). Kecamatan Gandang Batu Sillanan
- (7). Kecamatan Sangalla
- (8). Kecamatan Sangalla Selatan
- (9). Kecamatan Sangalla Utara
- (10). Kecamatan Makale
- (11). Kecamatan Makale Selatan
- (12). Kecamatan Makale Utara
- (13). Kecamatan Saluputti
- (14). Kecamatan Bittuang
- (15). Kecamatan Rembon
- (16). Kecamatan Masanda
- (17). Kecamatan Malimbong Balepe
- (18). Kecamatan Rantetayo
- (19). Kecamatan Kurra

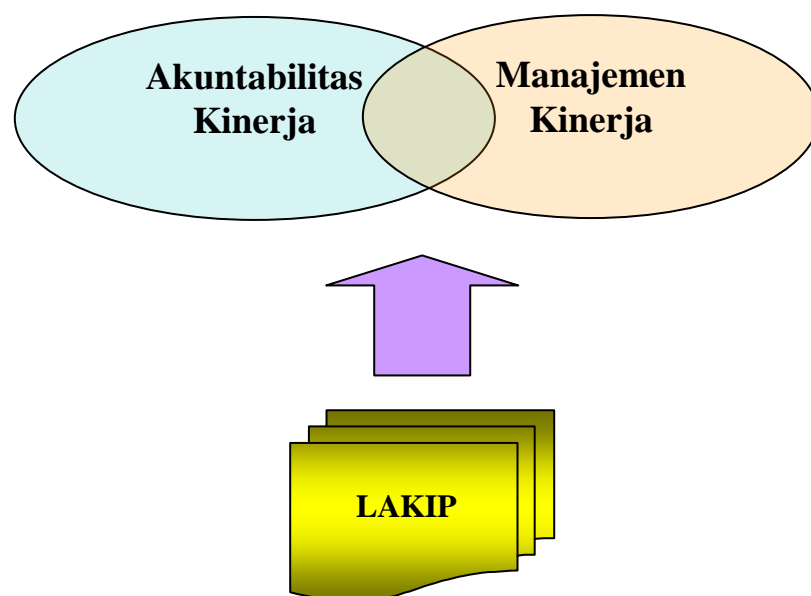
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan PERMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PERMENPAN & RB ini memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen

sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi Pemerintah.



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 mencakup hal-hal berikut ini:

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2023 sebagai sarana pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Tana Toraja atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun tersebut. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategik telah dicapai selama tahun 2023.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Tana Toraja bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA LAKIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut:

- Bab I – Gambaran Umum, menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan menjabarkan

maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2023 ini.

- Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan visi misi kabupaten serta rencana kinerja tahun 2023
- Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategik untuk tahun 2023.
- Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Tana toraja ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 2 tahun 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun ini dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen pemerintah Kabupaten Tana toraja dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap unit kerja.

Disamping itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tana toraja agar lebih terarah dan terjamin tercapainya program pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

2.1 PERNYATAAN VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

**” TANA TORAJA BANGKIT, PRODUKTIF DAN TANGGUH
MENYONGSONG TATANAN KEHIDUPAN BARU ”**

Yang dimaksud dengan **Tana Toraja Bangkit** adalah Suatu keadaan dimana Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja berupaya menghadirkan tindakan nyata guna memulihkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat Pandemi Covid 19 dan

berupaya menghidupkan aktifitas sosial masyarakat dan menggerakkan kegiatan perekonomian daerah dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan sehingga 5 tahun ke depan jumlah masyarakat miskin berkurang, produktivitas dan pendapatan masyarakat meningkat, tingkat pengangguran menurun, jumlah masyarakat terdidik meningkat, derajat kesehatan masyarakat meningkat, akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang dibutuhkan mudah dijangkau, serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat makin membaik. Demikian pula halnya dengan kesejahteraan seluruh jajaran aparat pemerintahan pada semua tingkatan pun meningkat, yang dimaksud dengan **Tana Toraja Produktif** adalah Suatu kondisi dimana masyarakat menjadi semakin sejahtera karena kesiapan serta kesungguhan Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat mengelola potensi unggulan daerah yaitu Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Air Tawar disamping bidang-bidang usaha potensial lainnya (Ekonomi Kreatif, UMKM, dan Sektor Jasa) agar senantiasa produktif dan dapat memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan, yang dimaksud dengan **Tana Toraja Tangguh** adalah Bahwa pembangunan Kabupaten Tana Toraja 5 tahun ke depan akan menciptakan kondisi bagi munculnya prakarsa-prakarsa masyarakat, keswadayaan, semangat gotong-royong, kemampuan beradaptasi serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial-ekonomi-ekologi. Ketentraman hidup masyarakat pun akan terwujud karena didukung oleh kehidupan Kerohanian masyarakat yang semakin berkualitas, terbangunnya tatanan kehidupan yang memiliki sikap kebersamaan, persaudaraan, kepedulian, kesetiakawanan sosial, rukun dan toleran serta mencintai kearifan budaya dan lingkungan alam kehidupannya dan yang dimaksud dengan **Tatanan Kehidupan Baru** adalah Suatu keadaan yang ditandai dengan kesiapan dan kesungguhan Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan adaptasi terhadap Tatanan Kehidupan Baru (*new normal*) akibat pandemic Covid-19. Pandemic Covid-19 mengharuskan masyarakat Kabupaten Tana Toraja hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat

'berdamai' dengan COVID-19. Tujuan *new normal* adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19.

Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mencanangkan misi sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, tanggap, peduli berbasis kinerja yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (E-Governance);
- 2) Memantapkan sistem pencegahan, penanganan, dan pengendalian Pandemi Covid 19 serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan;
- 3) Memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan belajar mengajar;
- 4) Memulihkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat di sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Air Tawar, UMKM, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, sektor jasa dan usaha-usaha produktif lainnya;
- 5) Mengembangkan potensi Pariwisata yang lebih variatif, inovatif dan terintegrasi selaras dengan upaya revitalisasi kearifan adat-budaya dan tata kelola pelestarian lingkungan hidup;
- 6) Membangun, memperbaiki, dan memelihara Infrastruktur (Jalan, jembatan dan Drainase) serta Sarana Prasarana publik vital;
- 7) Menguatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial berbasis akhlak, moral, budi pekerja dan sikap saling menghormati.

2.2 PENETAPAN KINERJA

Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 perencanaan kinerja yang termuat dalam RKPD tahun 2023 Pemda Kabupaten Tana Toraja menetapkan Program prioritas dengan memperhatikan perubahan kondisi lingkungan strategis daerah, kondisi organisasi, tema pembangunan Kabupaten Tana Toraja, serta dokumen acuan perencanaan lainnya.

Program prioritas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja lebih ditekankan pada kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi

pemerintah dengan tetap memperhatikan paradigma baru pembangunan yang berbasis pada manusia dan komunitas dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

- 1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan keuangan pemerintahan

Program Strategisnya:

- Program pengelolaan keuangan.
- Program pengelolaan barang milik daerah.
- Program pengelolaan pendapatan daerah.
- Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- Program penelitian dan pembangunan daerah.
- Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.
- Program pengembangan sumber daya manusia.
- Program kepegawaian daerah.
- Program perekonomian dan pembangunan.
- Program administrasi pemerintah desa.

- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Program strategisnya:

- Program pelayanan penanaman modal.
- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- Program pencatatan sipil.
- Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- Program pengelolaan aplikasi informatika.

- 3) Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat.

Program Strategisnya:

- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- Program pemberdayaan sosial.
- Program perlindungan dan jaminan sosial.
- Program penanganan bencana.
- Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.
- Program pengendalian penduduk.
- Program pembinaan keluarga berencana (KB).
- Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS).

4) *Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan minat baca masyarakat.*

Program Strategisnya:

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program pengembangan kurikulum.
- Program pendidik dan tenaga kependidikan.
- Program pengelolaan pendidikan.
- Program pengendalian perizinan pendidikan.
- Program pembinaan perpustakaan.
- Program pengelolaan arsip.
- Program perlindungan dan penyelamatan arsip.

5) *Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.*

Program Strategisnya:

- Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- Program perlindungan perempuan.
- Program peningkatan kualitas keluarga.
- Program pengelolaan sistem data gender dan anak.

- Program pemenuhan hak anak (PHA).

6) Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.

Program Strategisnya:

- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
- Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
- Program perizinan usaha pertanian.
- Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- Program penyuluhan pertanian.
- Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.
- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
- Program pengawasan keamanan pangan.
- Program pengelolaan perikanan budidaya.
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- Program pengelolaan perikanan tangkap.

7) Meningkatnya sektor UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah.

Program Strategisnya:

- Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- Program pengembangan iklim penanaman modal.
- Program promosi penanaman modal.
- Program pengembangan UMKM.
- Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
- Program pelayanan izin usaha simpan pinjam.
- Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
- Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.

- Program pendidikan dan latihan perkoperasian.
- Program peningkatan kerjasama desa.
- Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
- Program penempatan tenaga kerja.
- Program hubungan industrial.
- Program pengembangan kawasan transmigrasi.
- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan.
- Program standarisasi dan perlindungan konsumen.
- Program stabiisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
- Program perencanaan dan pembangunan industri.
- Program perizinan dan pendaftaran perusahaan.
- Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
- Program rehabilitasi sosial.
- Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM).

8) Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam pariwisata.

Program Strategisnya:

- Program pemasaran pariwisata.
- Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
- Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Program pengembangan kebudayaan.
- Program pembinaan sejarah.
- Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
- Program pengembangan kesenian tradisional.

9) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Program Strategisnya:

- Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- Program perencanaan lingkungan hidup.
- Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI).
- Program pengelolaan persampahan.
- Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).
- Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
- Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.
- Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
- Program penanganan pengaduan lingkungan hidup.
- Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.
- Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
- Program penanggulangan bencana.
- Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

10) Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital.

Program Strategisnya:

- Program kawasan permukiman.

- Program penyelenggaraan jalan.
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).
- Program penataan desa.
- Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
- Program pengembangan perumahan.
- Program pengembangan permukiman.
- Program penataan bangunan gedung.
- Program penataan bangunan dan lingkungannya.
- Program penyelenggaraan penataan ruang.
- Program pengelolaan sumber daya air (SDA).
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.

11) Terwujudnya penegakan perundang-undangan ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Program Strategisnya:

- Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.
- Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya.
- Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
- Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
- Program pengembangan kapasitas kepramukaan.
- Program peningkatan peran portal politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

- Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- Program pemeliharaan dan kesejahteraan rakyat.
- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
- Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD 2021-2026, tahun 2023 disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Rencana kinerja ini merupakan penjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja 2023 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Pemda Kabupaten Tana Toraja sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja 2023 ini.

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran digolongkan sesuai dengan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Keberhasilan Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	$91 \leq 100$	Sangat Baik
II	$76 \leq 90$	Baik
III	$66 \leq 75$	Cukup
IV	$51 \leq 65$	Kurang
V	≤ 50	Sangat Kurang

3.1 CAPAIAN KINERJA 2023

Sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2023, Perencanaan Kinerja Tahun 2023 mencakup pelaksanaan atas 31 indikator kinerja dalam 11 sasaran strategis.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang ditetapkan belum semua program yang ditetapkan dapat dicapai dengan optimal, capaian dari 11 sasaran tersebut, dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 3.2

Rentang/Kategori Capaian Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah Sasaran
I	$91 \leq 100$	Sangat Baik	5
II	$76 \leq 90$	Baik	4
III	$66 \leq 75$	Cukup	1
IV	$51 \leq 65$	Kurang	1
V	≤ 50	Sangat Kurang	0

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro, yang terinci sebagai berikut:

Tabel 3.3
*Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Tana Toraja*

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,33	70,73	
2	Tingkat Kemiskinan	%	11,90	30,23	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,05	3,37	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50		
5	PDRB per Kapita	Jumlah Rupiah	35,00		
6	Gini Rasio	Angka	0,315	0,350	

Sumber Data : BPS Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Tana Toraja

Keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah atau indikator kinerja utama, yang terinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
*Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tana Toraja*

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B (62)	C (43,54)	70,23
2	Indeks Kesehatan	Angka	82,22	82	100
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,5	2,65	106
4	Kunjungan wisatawan	Orang	561,661	481.966	86
5	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	67,55		
6	Indeks layanan infrastruktur	Angka	66,70		
7	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	132	125	94,69
8	Nilai SAKIP	Angka	B (67)	CC (55,95)	83,51
9	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	%	87,80	87,82	100
11	Angka Harapan Hidup (AHH)	%	74,40	73,3	98,79
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	72,40	68,77	99
13	Indeks Pendidikan	%	66,30	65,87	99,65
14	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku)	%	24,11	22,30	92,49

15	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	7,85	8,10	100
16	Persentase tingkat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	%	100	99,05	99,05
17	Persentase Kasus Kriminalitas yang tertangani	%	84	72	85,71
Rata-Rata Capaian					78,58

Sumber Data : BPS Kabupaten Tana Toraja dan OPD Kabupaten Tana Toraja

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dari 11 sasaran yang ditetapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2023, 6 sasaran tercapai dengan kategori capaian sangat baik, 5 sasaran kategori baik.

Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut ini:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Predikat SAKIP, dan Opini BPK.

Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut :

Tabel 3.4 Target, realisasi dan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan	1	Predikat SAKIP	Angka	B (67)	CC (55,95)	55,95
	2	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP
Rata-rata Capaian						

Sumber Data: Inspektorat kabupaten Tana Toraja

Penjelasan lebih lanjut capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Predikat SAKIP

Dalam Tahun 2023, sesuai target Indikator Kinerja dalam RPJMD yaitu predikat SAKIP adalah 67 dengan kategori B. Sedangkan capaian di tahun 2023 adalah 55,95 dengan kategori CC. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja dengan kategori kurang.

2) Opini BPK

Dalam Tahun 2023 Indikator Kinerja Opini BPK dalam RPJMD terhadap penilaian keuangan Kabupaten Tana Toraja adalah WTP. Sedangkan capaian di tahun 2023 WTP.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan

Indikator Kinerja		Capaian (%)	
		2022	2023
1	Predikat SAKIP	CC (55,14)	CC (55,95)
2	Opini BPK	WDP	WTP

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun ini dengan capaian tahun 2023, maka capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan tidak mengalami peningkatan.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
1	Predikat SAKIP	Angka	B (67)	CC (55,95)	55,95
2	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Tana Toraja

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023, indikator kinerja belum mencapai target yang ditentukan di RPJMD.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab peningkatan/penurunan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan ini adalah :

- Masih lemahnya komitmen kepala Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan BPK-RI, sehingga penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI belum begitu optimal jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD periode tahun 2021-2026.
- Tingkat ketaatan/kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah umumnya masih perlu di tingkatkan untuk terciptanya efektifitas, efisiensi dan ekonomis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Solusi yang telah dilakukan adalah membentuk Tim Kerja Dalam Rangka Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan sebagai berikut :

- Peningkatan intensitas koordinasi antara Tim Tindak Lanjut dan Kepala OPD untuk mendorong komitmen penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan, khususnya yang terkait dengan TP-TGR Keuangan Negara/Daerah, melalui pemantauan dan pemutahiran data

penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI secara berkala setiap tahunnya, termasuk koordinasi dan konsultasi yang lebih insentif dengan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

- Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal akan diarahkan pada perbaikan pengelolaan manajemen organisasi pemerintah daerah yang terkait dengan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, termasuk pengelolaan APBDes melalui penguatan peran Inspektorat Daerah selaku penjamin mutu (quality assurer) dan penyediaan jasa konsultasi bagi perangkat daerah dan perangkat desa.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan ini adalah sebesar Rp 1.180.053.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 954.782.414,- atau 80,91%.

Adapun Program – Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 489.318.000,- dengan realisasi Rp 483.526.240,- atau capaian 98,82%
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rp. 270.735.000,- dengan realisasi Rp 238.674.200,- atau capaian 88,16%
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 420.000.000,- dengan realisasi Rp 232.581.974,- atau capaian 55,38%.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan adalah sebanyak 3 program, yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat

Analisis pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat didukung oleh 8 (delapan) indikator yaitu Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik, Persentase penduduk ber-KTP El persatuan penduduk, Cakupan penerbitan kartu identitas anak (KIA), Persentase anak 0-18 tahun berakte kelahiran, Persentase pasangan berakta perkawinan, Persentase kecamatan yang telah melakukan pelayanan online administrasi kependudukan, Persentase lembaga pengguna yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dan Persentase penyajian profil kependudukan.

Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut :

Tabel 3.4 Target, realisasi dan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat	1	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	%	85	87,82	103
	2	Persentase penduduk ber-KTP El, Persatuan penduduk	%	86	96	111
	3	Cakupan Penerbitan kartu Identitas Anak (KIA)	%	72	57	79
	4	Persentase Anak 0-18	%	82	95	115

	5	Tahun berakte Kelahiran				
	6	Persentase Pasangan Berakta Perkawinan	%	50	63	126
	6	Persentase Kecamatan yang telah melakukan pelayanan online Administrasi Kependudukan	%	92	45	49
	7	Persentase lembaga pengguna yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	%	100	100	100
	8	Persentase penyajian profil kependudukan	%	100	100	100
Rata-rata Capaian						97,88

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan DPMPTSP

Dari rata-rata capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat di atas yaitu 97,88%, kriteria Penilaian Realisasi Kinerja adalah sangat baik.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat

Indikator Kinerja		Capaian (%)	
		2022	2023
1	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	-	87,82
2	Persentase penduduk ber-KTP EI, Persatuan penduduk	109	111
3	Cakupan Penerbitan kartu Identitas Anak (KIA)	83	79
4	Persentase Anak 0-18 Tahun berakte Kelahiran		
5	Persentase Pasangan Berakta Perkawinan	102	115
6	Persentase Kecamatan yang telah melakukan pelayanan online Administrasi Kependudukan	193	126
7	Persentase lembaga pengguna yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	68	49
8	Persentase penyajian profil kependudukan	-	100

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan DPMPTSP

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun ini dengan capaian tahun 2023, maka capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat ada 1 indikator kinerja yang mengalami penurunan.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
1	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	%	88,35	87,82	99,4
2	Persentase penduduk ber-KTP El, Persatuan penduduk	%	89	96	107
3	Cakupan Penerbitan kartu Identitas Anak (KIA)	%	75	57	76
4	Persentase Anak 0-18 Tahun berakte Kelahiran	%	85	95	111
5	Persentase Pasangan Berakte Perkawinan	%	65	63	96,9
6	Persentase Kecamatan yang telah melakukan pelayanan online Administrasi Kependudukan	%	95	42	44
7	Persentase lembaga pengguna yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	%		100	
8	Persentase penyajian profil kependudukan	%		100	

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan DPMPTSP

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023, ada indikator kinerja yang melampaui target yang ditentukan yaitu Persentase penduduk ber KTP-EL persatuan penduduk dan Persentase anak 0-18 tahun.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab peningkatan/penurunan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat ini adalah :

- Adanya dukungan dana.
- Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai mengakibatkan lambatnya proses pembuatan dokumen kependudukan.

Solusi yang telah dilakukan adalah membentuk Tim Kerja Dalam Rangka Meningkatnya Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai berikut :

- Memperbaiki dokumen kependudukan bagi masyarakat yang mempunyai data kependudukan bermasalah atau tidak sesuai dengan dokumen lainnya.
- Melakukan pelayanan langsung kemasyarakat pada tingkat Lembang/Kelurahan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat ini adalah sebesar Rp 351.725.000,-.

Adapun Program – Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 300.000.000,- dengan realisasi Rp 299.304.188,- atau capaian 99,77%
2. Program Pencatatan Sipil Rp. 41.375.000,- dengan realisasi Rp -,- atau capaian -%
3. Program Informasi Administrasi Kependudukan Rp. 10.350.000,- dengan realisasi Rp -,- atau capaian -%

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat adalah sebanyak 3 program, yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pencatatan Sipil, dan Program Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

3. Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat

Analisis pencapaian Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas dan akses Layanan Kesehatan Masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut :

Tabel 3.10 Target, realisasi dan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan bagi Seluruh Lapisan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH)			
	- Persentase ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas	Persen	100	63,27	63,27
	- Persentase ketersediaan obat PKD di Puskesmas	Persen	100	75,15	83,5
	- Persentase bangunan PKM yang sesuai permenkes 43 tahun 2019	Persen	100	68	68
	- Persentase Puskesmas yang dapat melayani rawat inap	Persen	95	68	71
	- Persentase Puskesmas yang mendapat operasional kesehatan	Persen	100	74,55	75
	- Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan sesuai standart	Persen	100	95,45	95
	- Prevalensi Stunting pada balita	Persen	18	16,4	91
	- Persentase bumil KEK yang mendapat pelayanan kesehatan	Persen	80	87,4	100
	- Persentase pemberian ASI Eksklusif	Persen	45	61,8	100
	- Persentase kunjungan balita	Persen	78	59,93	76,83
	- Persentase pemberian vitamin A pada balita	Persen	88	79,76	90,63
	- Persentase penanganan komplikasi pada neonatal	Persen	47	22,99	49
	- Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC (K4)	Persen	90	70,01	78
- Persentase persalinan oleh	Persen	97	91,46	94	

	tenaga kesehatan					
	- Persentase kunjungan nifas	Persen	95	90,61	95	
	- Persentase pemberian TTD pada ibu hamil	Persen	90	70,01	78	
	- Persentase KB aktif	Persen	69	70,4	100	
	- Persentase layanan pada lansia	Persen	55	53,1	97	
	- Persentase desa/Kel yang stop BAB	Persen	100	100	100	
	- Persentase tempat pengolahan makanan yang diawasi dan memenuhi standart	Persen	85	71,8	84,47	
	- Persentase TTU yang diawasi dan memenuhi standart	Persen	85	78	91,76	
	- Persentase angka kesembuhan TB paru	Persen	90	84,80	94,2	
	- Persentase penanganan KLB < 24 jam	Persen	100	100	100	
	- Persentase penanganan penderita diare	Persen	100	100	100	
	- Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan	Persen	100	4,1	4,1	
	- Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan	Persen	100	23,61	23,61	
	- Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan	Persen	75	39,7	53	
	- Ratio dokter terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	Ratio	45	17	37,77	
	- Ratio dokter gigi terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	Ratio	13	6	46,5	
	- Ratio perawat terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	Ratio	180	82	45	
	- Ratio bidan terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	Ratio	120	88	73,33	
	- Ratio apoteker terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	Ratio	12	13	108	
	- Ratio SKM terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	Ratio	16	11	68,75	
	- Ratio sanitarian terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	Ratio	18	11	61,11	
	- Ratio nutrisionis terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	Ratio	14	11	78,57	
	- Persentase pengawasan perizinan apotikal, toko obat, toko alkes dan optik, usaha mikro obat tradisional	Pesen	100	75	75	
Capaian Rata-rata					76,4	

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja

Dari rata-rata capaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH) di atas yaitu 76,4%, kriteria Penilaian Realisasi Kinerja adalah baik.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Tahun ini dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2020	2021	2022
1	Angka Harapan Hidup (AHH)			
	- Persentase ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas	55	60	63,27
	- Persentase ketersediaan obat PKD di Puskesmas	90	90	83,5
	- Persentase bangunan PKM yang sesuai permenkes 43 tahun 2019	50	50	68
	- Persentase Puskesmas yang dapat melayani rawat inap	95	95	71
	- Persentase Puskesmas yang mendapat operasional kesehatan	63,53	62	75
	- Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan sesuai standart	95,45	95,45	95,45
	- Prevalensi Stunting pada balita	80,29	77,01	91
	- Persentase bumil KEK yang mendapat pelayanan kesehatan	100	100	100
	- Persentase pemberian ASI Eksklusif	53,70	57,80	100
	- Persentase kunjungan balita	61,20	34,27	76,83
	- Persentase pemberian vitamin A pada balita	83,90	84,10	90,63
	- Persentase penanganan komplikasi pada neonatal	100	100	49
	- Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC (K4)	82	62,50	78
	- Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	94	70,86	94
	- Persentase kunjungan nifas	89,10	70,11	95
	- Persentase pemberian TTD pada ibu hamil	86	84,70	78
	- Persentase KB aktif	77	76,50	100
	- Persentase layanan pada lansia	28,87	30,10	97
	- Persentase desa/Kel yang stop BAB	94	97,80	100
	- Persentase tempat pengolahan makanan yang diawasi dan memenuhi standart	30	20	84,47
	- Persentase TTU yang diawasi dan memenuhi standart	70,80	71,60	91,76
	- Persentase angka kesembuhan TB paru	62	94,40	94,2
	- Persentase penanganan KLB < 24 jam	100	100	100
	- Persentase penanganan penderita diare	100	100	36,8
	- Persentase penderita hipertensi yang	35,70	0,46	4,1

mendapat pelayanan kesehatan				
- Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan	64,20	5,40	23,61	
- Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan	75	84,20	53	
- Ratio dokter terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	13,25	16	37,77	
- Ratio dokter gigi terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	5,13	4	46,5	
- Ratio perawat terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	54,27	39	45	
- Ratio bidan terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	94	39	73,33	
- Ratio apoteker terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	2,99	8	108	
- Ratio SKM terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	7,26	6	68,75	
- Ratio sanitarian terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	6,84	6,4	61,11	
- Ratio nutrisionis terhadap penduduk (per 100.000 pdd)	10,68	4,2	78,57	
- Persentase pengawasan perizinan apotikal, toko obat, toko alkes dan optik, usaha mikro obat tradisional	-	75	75	

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja

Dari tabel diatas Capaian kinerja pada Indikator Angka Harapan Hidup tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan bagi Seluruh Lapisan Masyarakat

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
1	Angka Harapan Hidup (AHH) - Persentase ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas - Persentase ketersediaan obat PKD di Puskesmas - Persentase bangunan PKM yang sesuai permenkes 43 tahun 2019 - Persentase Puskesmas yang dapat melayani rawat inap	Persen	74,20	76,4	100

<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Puskesmas yang mendapat operasional kesehatan - Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan sesuai standart - Prevalensi Stunting pada balita - Persentase bumil KEK yang mendapat pelayanan kesehatan - Persentase pemberian ASI Eksklusif - Pesentase kunjungan balita - Persentase pemberian vitamin A pada balita - Persentase penanganan komplikasi pada neonatal - Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC (K4) - Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan - Persentase kunjungan nifas - Persentase pemberian TTD pada ibu hamil - Persentase KB aktif - Persentase layanan pada lansia - Persentase desa/Kel yang stop BAB - Persentase tempat pengolahan makanan yang diawasi dan memenuhi standart - Persentase TTU yang diawasi dan memenuhi standart - Persentase angka kesembuhan TB paru - Persentase penanganan KLB < 24 jam - Persentase penanganan penderita diare - Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan - Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan - Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan - Ratio dokter terhadap penduduk (per 100.000 pdd) - Ratio dokter gigi terhadap penduduk (per 100.000 pdd) - Ratio perawat terhadap penduduk (per 100.000 pdd) - Ratio bidan terhadap 				
---	--	--	--	--

penduduk (per 100.000 pdd) - Ratio apoteker terhadap penduduk (per 100.000 pdd) - Ratio SKM terhadap penduduk (per 100.000 pdd) - Ratio sanitarian terhadap penduduk (per 100.000 pdd) - Ratio nutrisisionis terhadap penduduk (per 100.000 pdd) - Persentase pengawasan perizinan apotikal, toko obat, toko alkes dan optik, usaha mikro obat tradisional				
---	--	--	--	--

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023, ada indikator yang melampaui target yang ditentukan di RPJMD rata-rata capaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH) di atas yaitu 76,4% jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam RPJMD yaitu 74,20% atau dengan kategori sangat baik.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab kegagalan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat ini adalah:

- Adanya perubahan juknis dari kementerian kesehatan pada bulan Agustus 2023, untuk meningkatkan capaian terutama dalam kondisi sekarang ini perlu dibentuk kerjasamadan komitmen dari pengelola program sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Solusi yang perlu dilakukan Dalam Rangka Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat sebagai berikut :

- Pendampingan, pembinaan dan pengawasan berkala perlu dilakukan secara berkesinambungan baik oleh Dinas Kesehatan maupun lintas sektoral dalam menjamin pelayanan kesehatan yang lebih baik.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat ini adalah sebesar Rp 122.908.055.942,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 113.352.818.223,- atau 92,23%. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada sasaran ini sebesar 76,4%.

Adapun Program – Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 121.997.597.942,- dengan realisasi Rp 112.694.022.333,- atau capaian 92,37%
2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Rp. 536.264.000,- dengan realisasi Rp 391.648.890,- atau capaian 72,96%
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Rp. 278.994.000,- dengan realisasi Rp 188.817.000,- atau capaian 67,68%
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp. 94.700.000,- dengan realisasi Rp. 78.330.000,- atau capaian 82,71%.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat adalah sebanyak 4 program, yaitu Program Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

Minuman, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat dan Minat Baca Masyarakat

Analisis pencapaian Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat dan Minat Baca Masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar dan Minat Baca Masyarakat didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pendidikan.

Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut :

Tabel 3.4 Target, realisasi dan capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat dan Minat Baca Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dan Minat Baca Masyarakat	1	Indeks Pendidikan			
	- Angka melek huruf seluruh penduduk	%	93,78	93	99,79
	- Angka melek huruf pada usia dewasa	%	93,78	93	99,79
	- Angka melek huruf pada usia 15-24 thn	%	93,78	93	99,79
	- Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	92,9	98,23	105,7
	- Angka mengulang kelas	%	0	0	0
	- Angka putus sekolah	%	0,38	0,49	128
	- Angka melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs	%	100	100	100
	- Angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK	%	97,61	100	100
	- Rata-rata lama penyelesaian SD	Tahun	6	6	100
	- Rata-rata lama penyelesaian SMP	Tahun	3	3	100
	- Persentase gedung SD/MI dalam kondisi baik	%	79,4	78	98,24
	- Persentase gedung SMP/MTs dalam kondisi baik	%	75	75	100

	- Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar	Rasio	1:22	1:28	11
	- Rasio guru terhadap murid pada pendidikan menengah	Rasio	1:26	1:32	123
	- Rasio guru/murid/kelas rata-rata pada pendidikan dasar	Rasio	1:26	1:28	107
	- Rasio guru/murid/kelas rata-rata pada pendidikan menengah	Rasio	1:31	1:32	103
	- Persentase guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1	%	91,3	89,5	98
	- Persentase dosen/guru yang memenuhi kualifikasi S2/S3	%	10,9	9	90
	- Persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	%	55,5	35	63
	- Angka partisipasi murni pada pendidikan dasar	%	97,7	91	93
	- APK PAUD	%	65,20	60	92
	- APK SD	%	108,51	99,3	91
	- APK SMP	%	87,03	85	97
	- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar	Rasio	0,15		
	- Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	12.213	8.282	67,81
	- Koleksi Buku yang tersedia dipergustakaan	Exp	21.818	28.780	131,90
Rata-rata Capaian					91,96

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja

Penjelasan lebih lanjut capaian Indikator Kinerja Indeks Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam Tahun 2023, rata-rata Indikator Kinerja mencapai target namun ada 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar adalah 11% atau kategori sangat rendah. Tetapi secara keseluruhan rata-rata indikator kinerja adalah 91,96% atau kategori sangat baik.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat dan Minat Baca Masyarakat

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pendidikan				
	- Angka melek huruf seluruh penduduk		99,79	99,79	99,79
	- Angka melek huruf pada usia dewasa		98,68	98,71	99,79
	- Angka melek huruf pada usia 15-24 thn		98,24	98,69	99,79
	- Angka Partisipasi Sekolah (APS)		94	98,23	105,7
	- Angka mengulang kelas		2	2,8	0
	- Angka putus sekolah		100	100	128
	- Angka melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs		94	100	100
	- Angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK		6	6	100
	- Rata-rata lama penyelesaian SD		3	3	100
	- Rata-rata lama penyelesaian SMP		75,9	78	100
	- Persentase gedung SD/MI dalam kondisi baik		81,8	83,4	98,24
	- Persentase gedung SMP/MTs dalam kondisi baik		1:16	1:14	100
	- Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar		1:16	1:14	11
	- Rasio guru terhadap murid pada pendidikan menengah		1:22	1:19	123
	- Rasio guru/murid/ kelas rata-rata pada pendidikan dasar		1:28	1:26	107
	- Rasio guru/murid/ kelas rata-rata pada pendidikan menengah		85,16	89,50	103
	- Persentase guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1		-	0,9	98
	- Persentase dosen/ guru yang memenuhi kualifikasi S2/S3		44,4	35	90
	- Persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik		83,75	90,99	63
	- Angka partisipasi murni pada pendidikan dasar		-	56	93
	- APK PAUD		99,3	99,3	92
	- APK SD		111,40	96,88	91
	- APK SMP		0,14	0,14	97
	- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar		-	67,81	67,81
	- Jumlah Pengunjung Perpustakaan		-	131,90	131,90
	- Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan				

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Sasaran

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat dan Minat Baca Masyarakat

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
1	Indeks Pendidikan		66,30	91,96	138,7
	- Angka melek huruf seluruh penduduk	%		93	
	- Angka melek huruf pada usia dewasa	%		93	
	- Angka melek huruf pada usia 15-24 thn	%		93	
	- Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%		98,23	
	- Angka mengulang kelas	%		0	
	- Angka putus sekolah	%		0,49	
	- Angka melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs	%		100	
	- Angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK	%		100	
	- Rata-rata lama penyelesaian SD	Tahun		6	
	- Rata-rata lama penyelesaian SMP	Tahun		3	
	- Persentase gedung SD/MI dalam kondisi baik	%		78	
	- Persentase gedung SMP/MTs dalam kondisi baik	%		75	
	- Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar	Rasio		1:28	
	- Rasio guru terhadap murid pada pendidikan menengah	Rasio		1:32	
	- Rasio guru/murid/ kelas rata-rata pada pendidikan dasar	Rasio		1:28	
	- Rasio guru/murid/ kelas rata-rata pada pendidikan menengah	Rasio		1:32	
	- Persentase guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1	%		89,5	
	- Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2	%		9	
	- Persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	%		35	
	- Angka partisipasi murni pada pendidikan dasar	%		91	
- APK PAUD	%		60		
- APK SD	%		99,3		
- APK SMP	%		85		

- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar	Rasio			
- Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang		8.282	
- Koleksi Buku yang tersedia diperpustakaan	Exp		28.780	

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah, jadi persentase capaian adalah 138,7% atau kategori sangat baik.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat dan Minat Baca Masyarakat ini adalah :

- Adanya dukungan dana
- Adanya dukungan masyarakat dalam proses pembangunan daerah
- Adanya pemahaman ASN tentang indikator sasaran dan indikator kegiatan
- belum optimalnya koordinasi , sinkronisasi, efektifitas dalam rangka asistensi pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD.

Solusi yang telah dilakukan adalah membentuk Tim Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat dan Minat Baca Masyarakat sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, efektifitas dan peningkatan profesionalisme aparat sehingga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJMD dapat berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat dan Minat Baca Masyarakat ini adalah sebesar Rp 117.682.785.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 111.865.405.037,- atau 95,06%.

Adapun Program – Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan Rp. 116.145.087.000,- dengan realisasi Rp 110.349.494.037,- atau capaian 95,01%
2. Program Pembinaan Perpustakaan Rp. 1.505.000.000,- dengan realisasi Rp 1.486.883.000,- atau capaian 98,80%
3. Program Pengelolaan Kearsipan Rp. 32.698.000,- dengan realisasi Rp 29.028.000,- atau capaian 88,87%

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat dan Minat Baca Masyarakat adalah sebanyak 3 program, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pengelolaan Kearsipan.

5.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-----------	--

Analisis pencapaian Sasaran 5 : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pemberdayaan Gender.

Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut :

Tabel 3.16 Target, realisasi dan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Indeks Pemberdayaan Gender				
	- Persentase korban kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	70	100	142,86
	- Persentase kecamatan yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga	%	64	0	0
	- Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate	%	60	0	0
	- Persentase kecamatan yang memiliki forum anak	%	100	100	100
	- Persentase kasus korban kekerasan terhadap anak yang tertangani	%	70	100	142,86
	- Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitas pembinaan dan penanganan terpadu isu kependudukan di kampung KB	%	100	100	100
	- Persentase PUS peserta KB aktif	%	69,52	68,21	98,11
	- Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB,BKR,BKL, PIK/R, PPKS, dan UPPKS di setiap kecamatan	%	100	61,04	61,04
	Capaian Rata-rata				

Sumber Data : Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja

Penjelasan lebih lanjut capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pesentase korban kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani

Dalam Tahun 2023 indikator Indeks Pemberdayaan Gender yaitu Pesentase korban kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani adalah 100%, target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 adalah 100%, jadi persentase capaian adalah 142,86% atau kategori sangat baik.

2) Persentase kecamatan yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga

Dalam Tahun 2023 indikator Indeks Pemberdayaan Gender yaitu Persentase kecamatan yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga adalah 0%, target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 adalah 64%, jadi persentase capaian adalah 0% atau kategori sangat kurang.

3) Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate

Dalam Tahun 2023 indikator Indeks Pemberdayaan Gender yaitu Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate adalah 0%, target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 adalah 60%, jadi persentase capaian adalah 0% atau kategori sangat kurang.

4) Persentase kecamatan yang memiliki forum anak

Dalam Tahun 2023 indikator Indeks Pemberdayaan Gender yaitu Persentase kecamatan yang memiliki forum anak adalah 100%, target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 adalah 100%, jadi persentase capaian adalah 100% atau kategori sangat baik.

5) Persentase kasus korban kekerasan terhadap anak yang tertangani

Dalam Tahun 2023 indikator Indeks Pemberdayaan Gender yaitu Persentase kasus korban kekerasan terhadap anak yang tertangani adalah 100%, target yang ingin dicapai pada Tahun

2023 adalah 70%, jadi persentase capaian adalah 142,86% atau kategori sangat baik.

6) Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan dan penanganan terpadu isu kependudukan di kampung KB

Dalam Tahun 2023 indikator Indeks Pemberdayaan Gender yaitu Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan dan penanganan terpadu isu kependudukan di kampung KB adalah 100%, target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 adalah 100%, jadi persentase capaian adalah 100% atau kategori sangat baik.

7) Persentase PUS peserta KB aktif

Dalam Tahun 2023 indikator Indeks Pemberdayaan Gender yaitu Persentase PUS peserta KB aktif adalah 68,21%, target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 adalah 69,52%, jadi persentase capaian adalah 98,11% atau kategori sangat baik.

8) Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, PIK/R, PPKS dan UPPKS di setiap kecamatan

Dalam Tahun 2023 indikator Indeks Pemberdayaan Gender yaitu Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, PIK/R, PPKS dan UPPKS di setiap kecamatan adalah 61,04%, target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 adalah 100%, jadi persentase capaian adalah 61,04% atau kategori sangat baik.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.17 *Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pemberdayaan Gender				
	- Persentase korban kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	-	-	-	142,86
	- Persentase kecamatan yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga	-	-	-	0
	- Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate	-	-	-	0
	- Persentase kecamatan yang memiliki forum anak	-	-	-	100
	- Persentase kasus korban kekerasan terhadap anak yang tertangani	-	-	-	142,86
	- Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitas pembinaan dan penanganan terpadu isu kependudukan di kampung KB	-	-	-	100
	- Persentase PUS peserta KB aktif	-	-	-	98,11
	- Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB,BKR,BKL, PIK/R, PPKS, dan UPPKS di setiap kecamatan	-	-	-	61,04

Sumber Data : Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun ini ada 2 (dua) indikator yang masih rendah yaitu Persentase kecamatan yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga yaitu 0% dan Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate yaitu 0% atau kategori sangat rendah.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
-------------------	--------	--	-----------------------------------	-------------

1	Indeks Pemberdayaan Gender				
	- Persentase korban kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	80	142,86	
	- Persentase kecamatan yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga	%	100	0	
	- Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate	%	70	0	
	- Persentase kecamatan yang memiliki forum anak	%	100	100	
	- Persentase kasus korban kekerasan terhadap anak yang tertangani	%	-	142,86	
	- Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitas pembinaan dan penanganan terpadu isu kependudukan di kampung KB	%	-	100	
	- Persentase PUS peserta KB aktif	%	-	98,11	
	- Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB,BKR,BKL, PIK/R, PPKS, dan UPPKS di setiap kecamatan	%	-	61,04	

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tana Toraja

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah:

- Adanya dukungan dana
- Belum tersedianya pengelolaan dan sistem data terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Terbatasnya SDM yang tersedia dalam mendorong percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) disegala sektor pembangunan Kabupaten Tana Toraja

Solusi yang telah dilakukan adalah membentuk Tim Kerja Dalam Rangka Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- Membangun sinergitas antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Tana Toraja sebagai kabupaten Layak Anak dan Responsive Gender.
- Mempasilitasi sistem dan pengelolaan data terpadu perlindungan perempuan dan anak.
- Memperluas ruang partisipasi stakeholdier pembangunan Kabupaten Tana Toraja untuk secara bersama memperjuangkan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memperjuangkan kesetaraan gender disemua sektor pembangunan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah sebesar Rp 466.989.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 357.406.000,- atau 76,86%.

Adapun Program – Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Rp. 25.578.000,- dengan realisasi Rp 13.880.000,- atau capaian 54,27%
2. Program Perlindungan Perempuan Rp. 145.944.000,- dengan realisasi Rp 115.119.000,- atau capaian 78,88%
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga Rp. 90.500.000,- dengan realisasi Rp 70.031.000,- atau capaian 77,38%
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Rp. 50.055.800,- dengan realisasi Rp 27.410.000,- atau capaian 54,76%
5. Program Pemenuhan Hak Anak Rp. 152.911.200,- dengan realisasi Rp 130.966.000,- atau capaian 75,98%

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebanyak 5 program, yaitu Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak.

6. Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Keberhasilan Sasaran ini ditunjukkan atas capaian 6 Indikator kinerja yang mendukungnya yaitu Jumlah produksi padi, Jumlah produksi jagung, Jumlah produksi tanaman hortikultura, Jumlah produksi tanaman perkebunan, Jumlah peternakan dan Jumlah produksi perikanan. Capaian kinerja rata-rata sasaran ini adalah sebesar 96,80% atau pencapaian yang sangat tinggi dengan capaian masing-masing indikator yang mendukungnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan didukung oleh 6 (enam) indikator yaitu Jumlah produksi padi, Jumlah produksi jagung, Jumlah produksi tanaman hortikultura, Jumlah produksi tanaman perkebunan, Jumlah peternakan dan Jumlah produksi perikanan sebagai berikut :

Tabel 3.34 Target, realisasi dan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	1	Jumlah produksi padi	Ton	163.000	159.684	97,96
	2	Jumlah produksi jagung	Ton	2.100	1.996	95,04
	3	Jumlah produksi tanaman hortikultura	Ton	2.324	2.295,46	98,77
	4	Jumlah produksi tanaman perkebunan	Ton	640	600,79	93,87
	5	Jumlah peternakan	Ekor	168.975,22	162.998,33	96,46
	6	Jumlah produksi perikanan	Ekor	1.235.345	1.220.000	98,75
Capaian Rata-rata					96,80	

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja

Penjelasan lebih lanjut capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Persentase Jumlah Produksi Padi

Dalam Tahun 2023 jumlah produksi padi yang ada di kabupaten Tana Toraja adalah 159.648 Ton dari target 163.000 Ton. Jadi persentase jumlah produksi padi adalah 97,96% atau kategori sangat tinggi.

Luas tanaman Padi yang dicapai pada Tahun 2023 adalah 23.027 ha, jika dibandingkan dengan luas baku sawah yang di Kabupaten Tana Toraja tercatat seluas 14.391 ha, berarti bahwa indeks pertanaman padi yang dicapai baru mencapai 160,009 % artinya sawah yang ditanam padi 1x sampai 2x setahun. Hal ini terjadi karena sawah tersebut didukung oleh curah hujan yang cukup serta didukung pola tanam serempak.

Produksi yang tercatat pada tahun 2023 adalah 159.684 ton dengan rata-rata produktivitas 6,73 ton/ha. Selain itu sawah yang hanya ditanami padi 1 sampai 2 x setahun tersebut merupakan potensi sumber daya yang sangat besar jika ditanami dengan tanaman palawija karena tidak terlalu membutuhkan air, hanya

saja persoalan baru muncul karena para petani belum terbiasa menanam tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah ataupun kedelai di lahan sawah, penyebabnya antara lain masih banyak petani yang memahami bahwa menanam tanaman selain padi di sawah dianggap tabu dan penyebab yang lebih rasional sebenarnya adalah faktor penguasaan teknologi usaha tani palawija di lahan sawah yang dimiliki petani masih sangat lemah, untuk itulah diperlukan upaya-upaya dalam bentuk percontohan atau uji coba palawija di sawah setelah panen padi.

Tabel. Realisasi luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman Padi tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Makale	1.308	1.355	9.485	7,00
2	Makale Utara	905	892	6.110	6,85
3	Makale Selatan	528	539	3.708	6,88
4	Mengkendek	4.164	4.106	27.510	6,70
5	Gandasil	1.357	1.576	10.559	6,70
6	Sangalla	969	977	6.663	6,82
7	Sangalla Utara	787	778	5.290	6,80
8	Sangalla Selatan	1.595	1.713	11.648	6,80
9	Saluputti	1.092	1.104	7.286	6,60
10	Rembon	1.578	1.751	12.047	6,88
11	Malimbong Balepe	866	870	5.873	6,75
12	Bonggakaradeng	630	689	4.547	6,60
13	Rano	762	785	5.181	6,60
14	Bittuang	1.616	1.751	11.167	6,50
15	Masanda	469	429	2.789	6,50
16	Kurra	1.868	1.915	13.405	7,00
17	Rantetayo	1.527	1.572	10.297	6,55
18	Mappak	404	395	2.627	6,65
19	Simbuang	602	565	3.774	6,68
	Jumlah	23.027	23.729	159.684	6,73

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja

2) Persentase Jumlah Produksi Jagung

Dalam Tahun 2023 jumlah produksi jagung yang ada di kabupaten Tana Toraja adalah 1.996 Ton dari target 2.100 Ton. Jadi persentase jumlah produksi padi adalah 95,04% atau kategori sangat tinggi.

Produksi jagung pada tahun 2023 sebanyak 1.996 ton dengan luas tanam 264 ha dan luas panen 206 ha yang tersebar di 14 Kecamatan. Dengan target sebesar 2.100 ton pada tahun 2023 maka capaian indikator ini mencapai 95,04 % dari target.

Peruntukan jagung di Kabupaten Tana Toraja pada umumnya sebagai makanan ternak dan sebagian dikonsumsi muda. Terlepas dari keadaan tersebut pengembangan jagung mempunyai prospek yang baik apabila peruntukan komoditas jagung diarahkan pada pakan ternak babi dan ayam.

Rincian realisasi tanam, panen, produksi dan produktivitas tanaman jagung sebagai berikut

Tabel. Realisasi luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman jagung tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Makale	4	6	45	7,54
2	Makale Utara	-	-	-	-
3	Makale Selatan	-	10	69	6,88
4	Mengkendek	60	73	1.101	15,08
5	Gandasil	-	2	14	7,13
6	Sangalla	-	-	-	-
7	Sangalla Utara	-	-	-	-
8	Sangalla Selatan	-	2	13	6,50
9	Saluputti	30	32	229	7,15
10	Rembon	5	12	83	6,88
11	Malimbong Balepe	-	1	7	6,90
12	Bongkaradeng	51	56	370	6,60
13	Rano	-	7	46	6,60
14	Bittuang	50	53	360	6,80
15	Masanda	5	7	46	6,50
16	Kurra	1	2	17	8,50
17	Rantetayo	-	-	-	-
18	Mappak	-	-	-	-
19	Simbuang	-	1	7	6,78
Jumlah		206	264	1.996	7,56

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja

3) Persentase Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura

Dalam Tahun 2023 jumlah produksi tanaman hortikultura yang ada di kabupaten Tana Toraja adalah 2.295,46 Ton dari target 2.324 Ton. Jadi persentase jumlah produksi hortikultura adalah 98,77% atau kategori sangat tinggi.

Penjelasan dari capaian indikator sebagai berikut:

Produksi sayur-sayuran (Bawang Merah, Bawang Putih, Bawang Daun, Kentang, kubis, Kembang Kol, Sawi/petsai, Wortel, Lobak, Kacang Merah, Kacang Panjang, Cabai Besar, Cabe

Rawit, Pabrika, Jamur, Tomat, Terung, Buncis, Ketimun, Kangkung, Bayam, Melon, Semangka, Stroberi) pada tahun 2023 sebanyak 2.295,46 ton dengan luas tanam 79,284 ha dan luas panen 55,812 ha yang tersebar di 19 Kecamatan. Dengan target 2.324 ton pada tahun 2023 maka capaian indikator kinerja ini mencapai 98,77 %.

4) Persentase Jumlah Tanaman Perkebunan

Dalam Tahun 2023 jumlah produksi tanaman hortikultura yang ada di kabupaten Tana Toraja adalah 600,79 Ton dari target 640 Ton. Jadi persentase jumlah produksi padi adalah 93,87% atau kategori sangat tinggi.

5) Persentase Jumlah Peternakan

Dalam Tahun 2023 jumlah populasi ternak (sapi, kerbau, babi, kambing dan ayam buras) yang ada di kabupaten Tana Toraja yang tersebar di 19 kecamatan adalah 1.466.985 Ekor dari target 1.491.455 Ekor. Jadi persentase jumlah produksi padi adalah 98,15% atau kategori sangat tinggi.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.44 Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah produksi padi			98,39	97,96
2	Jumlah produksi jagung			88,74	95,04
3	Jumlah produksi tanaman hortikultura			98,53	98,77
4	Jumlah produksi tanaman perkebunan			93,44	93,87
5	Jumlah peternakan			99,18	96,46
6	Jumlah produksi perikanan				98,75

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja

Pada Tahun 2023 capaian sasaran Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan pada indicator Jumlah produksi padi pada tahun 2022 adalah 98,39% sedangkan pada tahun 2023 adalah 97,96%, Jumlah

produksi jagung pada tahun 2022 adalah 88,74% sedangkan pada tahun 2023 adalah 95,04%, Jumlah produksi tanaman hortikultura pada tahun 2022 adalah 98,53%sedangkan tahun 2023 adalah 98,77%, Jumlah produksi tanaman perkebunan pada tahun 2022 adalah 93,44% sedangkan pada tahun 2023 adalah 93,87%, Jumlah produksi peternakan pada tahun 2022 adalah 99,18% sedangkan pada tahun 2023 adalah 96,46 dan jumlah produksi perikanan pada tahun 2023 adalah 98,75%.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Sasaran Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
1	Jumlah produksi padi	Ton	183.416	159.684	87,04
2	Jumlah produksi jagung	Ton	13.184	1.996	15,14
3	Jumlah produksi tanaman perkebunan	Ton	5.447	600,79	11,03

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023, ada 1 (satu) indicator yang pencapaiannya baik, tetapi ada juga beberapa indicator yang pencapaiannya belum maksimal bahkan dibawah target yang ditentukan yaitu Jumlah produksi Jagung dan jumlah produksi tanaman perkebunan. Kegagalan pencapaian target indicator tersebut disebabkan antara lain masih banyak petani yang memahami bahwa menanam tanaman selain padi di sawah dianggap tabu dan penyebab yang lebih rasional sebenarnya adalah faktor penguasaan teknologi

usaha tani palawija dilahan sawah yang dimiliki petani masih sangat lemah.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan ini adalah:

- Adanya dukungan dana
- Adanya dukungan masyarakat dalam proses pembangunan daerah

Solusi yang telah dilakukan adalah membentuk Tim Kerja Dalam Rangka Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagai berikut :

- Bekerja sama dengan lembaga-lembaga/ tenaga ahli dalam rangka penyusunan capaian kinerja Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan khususnya di lingkup Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja pada umumnya.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan ini adalah sebesar Rp 4.235.843.500,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 4.130.699.085,- atau 97,52%.

Adapun Program – Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rp. 803.000.000,- dengan realisasi Rp 796.142.000,- atau capaian 99,15%

2. Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian Rp. 1.344.687.500,- dengan realisasi Rp 1.288.533.125,- atau capaian 95,82%
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Rp. 26.700.000,- dengan realisasi Rp 26.360.000,- atau capaian 98,73%
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner Rp. 890.540.000,- dengan realisasi Rp 867.403.000,- atau capaian 97,40%
5. Program Penyuluhan Pertanian Rp. 643.620.000,- dengan realisasi Rp 635.228.300,- atau capaian 98,70%.
6. Program Peningkatan Deversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp. 138.020.000,- dengan realisasi Rp. 136.623.660,- atau capaian 98,99%
7. Program Penanganan Kerawanan Pangan Rp. 31.880.000,- dengan realisasi Rp. 31.834.100 atau capaian 99,86%
8. Program Pengawasan Keamanan Pangan Rp. 53.643.000,- dengan realisasi Rp. 50.667.000,- atau capaian 94,45%
9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp. 100.100.000,- dengan realisasi Rp. 97.500.000,- atau capaian 97,40%
10. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp. 203.653.000,- dengan realisasi Rp. 200.407.900,- atau capaian 98,41%

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah sebanyak 10 program, yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner, Program Penyuluhan Pertanian, Program Peningkatan Deversifikasi dan

Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

7. Meningkatnya sektor UMKM, Industry rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah

Keberhasilan sasaran ini ditunjukkan atas capaian 1 (satu) Indikator kinerja yang mendukungnya yaitu Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB. Capaian kinerja rata-rata sasaran ini adalah sebesar 81,63% dengan capaian masing-masing indikator yang mendukungnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Meningkatnya sektor UMKM, Industry rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB. Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut :

Tabel 3.22 Target, realisasi dan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya sektor UMKM, Industry rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya sektor UMKM, Industry rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah	1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB			
	- Persentase Koperasi Aktif	%	62	52	83,87
	- Persentase Pertumbuhan UMKM	%	8	7,46	93,25
	- Persentase pasar yang termanfaatkan dengan baik	%	37,84	47,83	126,4
	- Persentase industri yang berkembang	%	24,23	5,57	23
Rata-rata Capaian					81,63

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja

Penjelasan lebih lanjut capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Dalam Tahun 2023 indikator Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB, yaitu Persentase koperasi aktif, Persentase pertumbuhan UKM, Persentase pasar yang termanfaatkan dengan baik dan Persentase industri yang berkembang adalah 81.63 %, jadi persentase capaian dari indikator Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB, adalah 81,63 % atau kategori baik.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya sektor UMKM, Industry rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB				
	- Persentase Koperasi Aktif		86,3	87,4	83,87
	- Persentase Pertumbuhan UMKM		8,21	12,28	93,25
	- Persentase pasar yang termanfaatkan dengan baik		30,43	34,78	126,4
	- Persentase industri yang berkembang		0,89	105,62	23

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun ini dengan capaian beberapa tahun terakhir, maka secara umum capaian kinerja pada sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ini mengalami peningkatan kecuali indikator kinerja pada persentase industri yang berkembang yang mengalami penurunan.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

Tabel 3.24

Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Sasaran Meningkatnya sektor UMKM, Industry rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB				
	- Persentase Koperasi Aktif	%	70	52	74,28
	- Persentase Pertumbuhan UMKM	%	15	7,46	49,73
	- Persentase pasar yang termanfaatkan dengan baik	%	48,65	47,83	98,31
	- Persentase industri yang berkembang	%	40,15	5,57	13,87

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023, sasaran tersebut belum mencapai target yang ditentukan di RPJMD mencapai target.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ini adalah:

- Adanya dukungan dana, baik dana DAU, DAK, maupun hibah Provinsi.
- Adanya dukungan masyarakat yang terlibat sebagai pelaku UMKM yang cukup tinggi.
- Adanya kerjasama antara pihak swasta dalam pembinaan dan pengembangan UMKM.

Solusi yang telah dilakukan adalah membentuk Tim Kerja Dalam Rangka pencapaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ini adalah sebesar Rp 1.739.231.500,-.

Adapun Program – Program yang mendukung Sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB adalah sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 120.785.000,-
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 216.442.000,-
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Rp. 90.560.000,-
4. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp. 448.347.000,-
5. Program Pengembangan UMKM Rp. 249.621.500,-
6. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Rp. 22.500.000,-
7. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Rp. 269.690.000,-
8. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Rp. 29.925.000,-
9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Rp. 192.500.000,-
10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Rp. 98.861.000,-

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB adalah sebanyak 10 program, yaitu Program Pegawai dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Program Pengembangan UMKM, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

8.

Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam parawisata

Keberhasilan sasaran ini ditunjukkan atas capaian 8 (delapan) Indikator kinerja yang mendukungnya yaitu Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, Jumlah kunjungan wisatawan nusantara, Rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara, Rata-rata lama kunjungan wisatawan nusantara, Jumlah DTW yang di promosikan, Jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar sebagai HKI, Jumlah kelompok sadar wisata yang di bentuk dan Jumlah desa wisata yang di SK-kan. Capaian kinerja rata-rata sasaran ini adalah sebesar 104,33% dengan capaian masing indikator yang mendukungnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Meningkatkan pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam parawisata didukung oleh 8 (delapan) indikator yaitu Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, Jumlah kunjungan wisatawan nusantara, Rata-rata

lama kunjungan wisatawan mancanegara, Rata-rata lama kunjungan wisatawan nusantara, Jumlah DTW yang di promosikan, Jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar sebagai HKI, Jumlah kelompok sadar wisata yang di bentuk dan Jumlah desa wisata yang di SK-kan. Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut :

Tabel 3.25 Target, realisasi dan capaian kinerja Sasaran Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Lapisan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam parawisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	5.000	4024	80,48
	2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	887.864	487.461	54,90
	3	Rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara	Hari	4,5	4	88,88
	4	Rata-rata lama kunjungan wisatawan nusantara	Hari	2.5	2	80
	5	Jumlah DTW yang di promosikan	DTW	18	24	133,33
	6	Jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar sebagai HKI	Produk	2	0	0
	7	Jumlah kelompok sadar wisata yang di bentuk	Kelompok	18	21	116,66
	8	Jumlah desa wisata yang di SK-kan	Desa Wisata	20	56	280
Rata-rata Capaian					104,33	

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Penjelasan lebih lanjut capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) a. Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Dalam Tahun 2023 Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara yang ada di kabupaten Tana Toraja adalah 4.024 orang dari target 5.000 orang. Jadi persentase jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah 80,48% atau kategori tinggi.

b. Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Dalam Tahun 2023 Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara yang ada di kabupaten Tana Toraja adalah 487.461 orang dari target 887.864 orang. Jadi persentase jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah 54,90% atau kategori rendah.

c. Persentase Rata-rata Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Dalam Tahun 2023 Jumlah Rata-rata Kunjungan Wisatawan mancanegara yang ada di kabupaten Tana Toraja adalah 4 hari dari target 4,5 hari. Jadi persentase rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara adalah 88,88% atau kategori tinggi.

d. Persentase Rata-rata Kunjungan Wisatawan Nusantara

Dalam Tahun 2023 Rata-rata Kunjungan Wisatawan nusantara yang ada di kabupaten Tana Toraja adalah 2 hari dari target 2,5 hari. Jadi persentase rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara adalah 80% atau kategori sangat tinggi.

e. Persentase Jumlah DTW yang di Promosikan

Dalam Tahun 2023 Jumlah DTW yang di Promosikan yang ada di kabupaten Tana Toraja adalah 24 DTW dari target 18 DTW. Jadi persentase jumlah DTW yang di Promosikan adalah 133,33% atau kategori sangat tinggi.

f. Persentase Jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar sebagai HKI

Dalam Tahun 2023 Jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar sebagai HKI yang ada di kabupaten Tana Toraja adalah 0 produk dari target 2 produk. Jadi persentase jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar sebagai HKI adalah 0% atau kategori sangat rendah.

g. Persentase Kelompok Sadar Wisata yang di bentuk

Dalam Tahun 2023 Jumlah Kelompok sadar wisata yang ada di kabupaten Tana Toraja adalah 21 Kelompok dari target

18 Kelompok. Jadi persentase Kelompok Sadar Wisata yang di bentuk adalah 116,66% atau kategori tinggi.

h. Persentase Jumlah Desa Wisata yang di SK-kan

Dalam Tahun 2023 Jumlah Desa Wisata yang di SK-kan yang ada di kabupaten Tana Toraja adalah 56 Desa dari target 20 Desa. Jadi persentase jumlah Desa Wisata yang di SK-kan adalah 280% atau kategori sangat tinggi.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.26 *Perbandingan Capaian Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam parawisata Tahun ini dan beberapa tahun terakhir*

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	-	-	53,40	80,48
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	-	-	85,98	54,90
3	Rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara	-	-	75	88,88
4	Rata-rata lama kunjungan wisatawan nusantara	-	-	80	80
5	Jumlah DTW yang di promosikan	-	-	100	133,33
6	Jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar sebagai HKI	-	-	100	0
7	Jumlah kelompok sadar wisata yang di bentuk	-	-	100	116,66
8	Jumlah desa wisata yang di SK-kan	-	-	222,22	280

Sumber Data : Dinas Parawisata, Kepemudaan dan Olahraga

Pada Tahun 2023 capaian sasaran Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam parawisata adalah 104,33%, sedangkan pada tahun 2022 adalah 102,08%.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

Tabel 3.27 *Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat*

dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Sasaran Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam parawisata

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
1	Kunjungan Wisatawan	Orang	1.210.789	491.485	40,59

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023, sasaran tersebut belum mencapai Target di RPJMD yaitu 491.485 Orang, dimana RPJMD menargetkan persentase Kunjungan Wisatawan adalah 1.210.789 Orang, jadi capaian Sasaran Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam parawisata pada indicator Kunjungan Wisatawan adalah 40,59 % atau kategori rendah.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam parawisata ini adalah:

- Adanya dukungan dana
- Adanya dukungan masyarakat dalam proses peningkatan pengembangan kepariwisataan
- Adanya Kepedulian Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tentang kunjungan wisatawan.

Solusi yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Dalam Rangka Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam parawisata sebagai berikut :

- Bekerja sama dengan lembaga-lembaga/ tenaga ahli dalam rangka Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang

variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam parawisata khususnya di lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam parawisata ini adalah sebesar Rp 5.866.813.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 5.636.631.264,- atau 96,08%. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada sasaran ini sebesar 104,33% berarti tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 8,25%.

Adapun Program – Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam parawisata adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Rp. 4.116.813.000,- dengan realisasi Rp 3.911.142.590,- atau capaian 95%
2. Program Pemasaran Pariwisata Rp. 1.550.000.000,- dengan realisasi Rp 1.525.488.674,- atau capaian 98,42%
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp. 200.000.000,- dengan realisasi Rp 200.000.000,- atau capaian 100%.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam parawisata adalah sebanyak 3 program, yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata dan

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

9. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

Keberhasilan sasaran ini ditunjukkan atas capaian 8 (delapan) Indikator kinerja yang mendukungnya yaitu pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, perencanaan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati (KeHati), pengelolaan persampahan, peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penanganan pengaduan lingkungan hidup, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, dan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Capaian kinerja rata-rata sasaran ini adalah sebesar 98,75 % dengan capaian masing indikator yang mendukungnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim didukung oleh 8 (delapan) indikator yaitu pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, perencanaan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati (KeHati), pengelolaan persampahan, peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penanganan pengaduan lingkungan hidup, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, dan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut :

Tabel 3.28 *Target, realisasi dan capaian kinerja Sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	1 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Paket	1	1	95
	2 Perencanaan lingkungan hidup	Dokumen	2	2	100
	3 Pengelolaan keanekaragaman hayati (KeHati)	Paket	2	2	97
	4 Pengelolaan persampahan	Paket	2	2	99
	5 Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Paket	2	2	99
	6 Penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	100	100
	7 Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	%	39,53	39,53	100
	8 Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	100	100	100
Rata-rata Capaian					98,75

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, PUTR dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja

Penjelasan lebih lanjut capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Dalam tahun 2023 dilaksanakan pengambilan sampel air pada 4 anak sungai untuk diuji dilaboratorium, juga melalui

pemeliharaan bangunan Pengujian Kelaikan ONLIMO. Stasiun ONLIMO berlokasi di Kelurahan Batupanan, Kecamatan Makale yang bertujuan untuk memantau kualitas air sungai di sungai saddang sewaktu (real time) secara kontinyu, otomatis dan online. Persentase capaian indikator ini adalah 95% atau kategori sangat baik.

2) Perencanaan lingkungan hidup

Capaian indikator kinerja ini adalah 100% atau kategori sangat baik. Kegiatan ini meliputi pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025-2045 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2030.

3) Pengelolaan keanekaragaman hayati (KeHati)

Capaian indikator ini adalah 97% atau kategori sangat baik. Kegiatan ini meliputi pengadaan dan penanaman bibit pohon tabebuya, duku dan manggis.

4) Pengelolaan persampahan

Capaian indikator ini adalah 99% atau kategori sangat baik. Kegiatan ini meliputi pengelolaan sampah melalui kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPS/SPA serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

5) Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Capaian indikator ini adalah 99% atau kategori sangat baik. Kegiatan ini meliputi pendampingan pada kegiatan program kampung iklim (Proklim) yang dilakukan pada lembang Lea kecamatan Makale dan lembang Pa'tengko kecamatan Mengkendek serta pendampingan duta lingkungan hidup Kabupaten Tana Toraja pada pemelihan duta lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

6) Penanganan pengaduan lingkungan hidup

Capaian indikator ini adalah 100% atau kategori sangat baik. Kegiatan ini meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Selama tahun 2023 ada 1 (satu) pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti.

7) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

Capaian indikator ini adalah 100% atau kategori sangat baik.

8) Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Dalam Tahun 2023 Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Tana Toraja yang terjadi sebanyak 41 kejadian yang terdiri dari kebakaran rumah/bangunan 10 kali kejadian, kebakaran lahan/kebun 10 kali kejadian, kebakaran hutan 19 kejadian dan kebakaran kendaraan 2 kali kejadian. Sedangkan pelayanan non kebakaran terdapat 1 kali kasus yaitu penangkapan ular yang masuk rumah warga. Capaian indikator ini adalah 100 % atau kategori sangat baik.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.29 Perbandingan Capaian Sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2020	2021	2022	2023
1 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-	-	-	95
2 Perencanaan lingkungan hidup				100
3 Pengelolaan keanekaragaman hayati (KeHati)				97
4 Pengelolaan persampahan				99
5 Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat				99
6 Penanganan pengaduan lingkungan hidup				100

7	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional				100
8	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran				100

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, PUTR dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja

Pencapaian Sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim tahun 2023 adalah 98,75% atau Kategori Capaian sangat Baik.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
1	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Paket		1	
2	Perencanaan lingkungan hidup	Dokumen		2	
3	Pengelolaan keanekaragaman hayati (KeHati)	Paket		2	
4	Pengelolaan persampahan	Paket		2	
5	Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Paket		2	
6	Penanganan pengaduan lingkungan hidup	%		100	
7	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	%		39,53	

8	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%		100	
---	---	---	--	-----	--

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, PUTR dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023, sasaran tersebut belum mencapai 100% karena realisasi masih ada selisih sekitar 18,27

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab belum tercapainya pencapaian indikator pada sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim ini adalah :

- Masih kurangnya penguatan kelembagaan DLH baik dari segi SDM, anggaran, kebijakan hukum lingkungan, dan kebijakan infrastruktur dalam rangka pencapaian tata kelola lingkungan hidup yang baik ke depan.
- Perencanaan masih kurang terutama yang berbasis pada data dan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- Perlunya penguatan kelembagaan DLH baik dari segi SDM, anggaran, kebijakan hukum lingkungan, dan kebijakan infrastruktur dalam rangka pencapaian tata kelola lingkungan hidup yang baik ke depan.
- Perlu perencanaan yang matang, dengan berbasis pada data dan informasi tentang pengelolaan Lingkungan Hidup yang reliable dan akuntabel, sehingga diharapkan ke depan perencanaan tata kelola Lingkungan Hidup lebih komprehensif dalam menjawab fenomena dan tantangan pengelolaan Lingkungan Hidup ke depan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim ini adalah sebesar Rp 2.748.280.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 2.450.747.527,- atau 89,17%. Adapun Program – Program yang mendukung Sasaran Terwujudnya Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim adalah sebagai berikut :

1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Rp. 18.120.000,- dengan realisasi Rp 17.198.740,- atau capaian 94,92 %.
2. Program perencanaan lingkungan hidup Rp. 250.000.000,- dengan realisasi Rp. 250.000.000,- atau capaian 100 %.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Rp. 95.500.000,- dengan realisasi Rp. 91.600.000,- atau capaian 95,92 %.
4. Program pengelolaan persampahan Rp.2.208.050.000,- dengan realisasi Rp. 2.161.887.800,- atau dengan capaian 97,91 %.
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Rp. 16.800.000,- dengan realisasi 16.800.000,- dengan capaian 100 %.
6. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup Rp. 10.000.000,- dengan realisasi Rp. 7.175.000,- atau dengan capaian 71,75 %.
7. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional Rp. 295.000.000,- dengan realisasi Rp. 272.596.000,- atau dengan capaian 92,41 %.

8. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Rp. 632.350.000,- dengan realisasi Rp. 607.897.090,- atau dengan capaian 96,13 %.
9. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Rp. 213.025.000,- dengan realisasi Rp. 210.228.135,- atau dengan capaian 98,69%.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim adalah sebanyak 9 program, yaitu Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Program perencanaan lingkungan hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program pengelolaan persampahan, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program penanganan pengaduan lingkungan hidup, Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dan Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

10.	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrasrtuktur Daerah serta Sarana Prasarana Publik Vital
------------	--

Keberhasilan Sasaran ini ditunjukkan atas capaian 1 indikator kinerja yang mendukungnya yaitu Indeks Layanan Infrastruktur. Capaian kinerja rata-rata sasaran ini adalah sebesar 100% atau kategori sangat tinggi dengan capaian masing-masing indikator yang mendukungnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Layanan Infrastruktur. Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut :

Tabel 3.49 Target, realisasi dan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital	1	Indeks Layanan Infrastruktur			
	- Persentase cakupan ketersediaan rumah tidak layak huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan pemukiman yang layak	%	89,33	100	100
	- Cakupan kualitas layanan infrastruktur ke PU-an dalam meningkatkan perekonomian (Gini Ratio)	%	0,384	0,384	100
	- Persentase sampah yang tertangani	%	37,15	37,15	100
	- Persentase rumah tangga yang bersanitasi	%	35,20	35,20	100
	- Persentase bangunan Pemerintah yang tertata dengan baik	%	100	100	100
	- Jumlah penerbitan rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah/lahan	%	60	60	100
	- Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	62,40	62,40	100
	- Pesentase penduduk berakses air minum/air bersih	%	100	100	100
	- Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	71,52	71,52	100
Capaian Rata-rata					100

Sumber Data : Dinas PRKP dan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja

Penjelasan lebih lanjut capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan tabel di atas Indikator Kinerja Indeks Layanan Infrastruktur mencapai target 100% atau kategori sangat baik.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.50 Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital, dua Tahun terakhir

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2020	2021	2022
1	Indeks Layanan Infrastruktur			
	- Persentase cakupan ketersediaan rumah tidak layak huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan pemukiman yang layak	-	100	100
	- Cakupan kualitas layanan infrastruktur ke PU-an dalam meningkatkan perekonomian (Gini Ratio)	-	0,384	0,384
	- Persentase sampah yang tertangani	-	-	37,15
	- Persentase rumah tangga yang bersanitasi	-	35,20	35,20
	- Persentase bangunan Pemerintah yang tertata dengan baik	-	-	100
	- Jumlah penerbitan rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah/lahan	-	-	60
	- Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	-	61,51	62,40
	- Pesentase penduduk berakses air minum/air bersih	-	-	100
	- Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	-	69,27	71,52

Sumber Data : Dinas PRKP dan Dinas PUPR Kabupaten Tana Toraja

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun ini dengan capaian satu tahun terakhir, maka secara umum capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital ini tidak mengalami perubahan atau tetap.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

Tabel 3.51 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Sasaran Meningkatnya Dukungan Infrastruktur

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
1	Indeks Layanan Infrastruktur				
	- Persentase cakupan ketersediaan rumah tidak layak huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan pemukiman yang layak	%	95	100	83,79
	- Cakupan kualitas layanan infrastruktur ke PU-an dalam meningkatkan perekonomian (Gini Ratio)	%	0,348	0,384	100
	- Persentase sampah yang tertangani	%	37,15	37,15	100
	- Persentase rumah tangga yang bersanitasi	%	35,20	35,20	100
	- Persentase bangunan Pemerintah yang tertata dengan baik	%	100	100	100
	- Jumlah penerbitan rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah/lahan	%	60	60	100
	- Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	62,40	62,40	100
	- Pesentase penduduk berakses air minum/air bersih	%	100	100	100
	- Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	71,52	71,52	100

Sumber Data : Dinas PRKP dan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja

Untuk sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital yang di dukung oleh Indikator Kinerja Indeks Layanan Infrastruktur tahun 2023 Jika dibandingkan dengan target RPJMD rata-rata mencapai target 98,20% atau dengan Kategori sangat baik.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital ini adalah:

- Adanya dukungan dana
- Adanya dukungan masyarakat dalam proses pembangunan daerah

Solusi yang telah dilakukan oleh Dinas PRKP dan Dinas PUPR sebagai berikut :

- Bekerja sama dengan lembaga-lembaga/tenaga ahli, masyarakat dalam rangka pencapaian Sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital khususnya di lingkungan Perangkat Daerah yang terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja pada umumnya.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital ini adalah sebesar Rp 161.659.211.734,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 123.850.197.794,- atau 76,61%. Adapun Program – Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Dukungan Infrastruktur adalah sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan jalan Rp. 141.791.496.929,- dengan realisasi Rp. 106.041.245.441,- atau sebesar 74,79%.
2. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Rp. 1.382.100.000,- dengan realisasi Rp. 537.816.428,- atau sebesar 38,91%.
3. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik Rp. 190.900.000,- dengan realisasi Rp. 190.460.000,- atau sebesar 99,77%.

4. Program penataan bangunan gedung Rp. 233.700.000,- dengan realisasi Rp. 226.928.000,- atau sebesar 97,10%.
5. Program penataan bangunan dan lingkungannya Rp. 11.657.220.000,- dengan realisasi Rp. 10.873.591.500,- atau sebesar 93,28%.
6. Program penyelenggaraan penataan ruang Rp. 1.431.523.000,- dengan realisasi Rp. 1.431.414.000,- atau sebesar 99,99%.
7. Program pengelolaan sumberdaya air (SDA) Rp. 2.751.323.280,- dengan realisasi Rp. 2.340.373.280,- atau sebesar 85,06%.
8. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Rp. 2.220.948.525,- dengan realisasi Rp. 2.208.369.145,- atau sebesar 99,43%.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital adalah sebanyak 8 program, yaitu Program penyelenggaraan jalan, Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Program penataan bangunan gedung, Program penataan bangunan dan lingkungannya, Program penyelenggaraan penataan ruang, Program pengelolaan sumberdaya air (SDA) dan Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.

11.

Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat

Keberhasilan sasaran ini ditunjukkan atas capaian 6 (enam) Indikator kinerja yang mendukungnya yaitu Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi, Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan

Budaya yang tepat sasaran, Cakupan Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dan Capaian Kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik serta persentase penegakan perda. Capaian kinerja rata-rata sasaran ini adalah sebesar 83,61% atau kategori baik dengan capaian masing-masing indikator yang mendukungnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat didukung oleh 6 (enam) indikator yaitu Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi, Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang tepat sasaran, Cakupan Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dan Capaian Kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik serta persentase penegakan perda. Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut :

Tabel 3.34 Target, realisasi dan capaian kinerja Sasaran Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	1 Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100
	2 Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	%	100	60	60
	3 Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang tepat sasaran	%	100	100	100
	4 Cakupan Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	%	100	41,66	41,66
	5 Capaian Kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan	%	100	100	100

	6	politik Persentase penegakan perda	%	100	100	100
Capaian Rata-rata						83,61

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja

Penjelasan lebih lanjut capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Dalam Tahun 2023 Indikator Kinerja Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah 100% target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 adalah 100% jadi persentase capaian dari indikator Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah 100% atau kategori sangat Baik.

2) Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi

Dalam Tahun 2023 Indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi adalah 60% target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 adalah 100% jadi persentase capaian dari indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi adalah 60% atau kategori Kurang.

3) Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang tepat sasaran

Dalam Tahun 2023 Indikator Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang tepat sasaran adalah 100% target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 adalah 100% jadi persentase capaian dari indikator Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang tepat sasaran adalah 100% atau kategori Baik.

4) Cakupan Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Dalam Tahun 2023 Indikator Cakupan Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik adalah 41,66% target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 adalah 100% jadi persentase capaian dari indikator Cakupan Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik adalah 41,66% atau kategori sangat Kurang.

5) Capaian Kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik

Dalam Tahun 2023 Indikator Cakupan Kegiatan Peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik adalah 100% target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 adalah 100% jadi persentase capaian dari indikator Cakupan Kegiatan Peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik adalah 100% atau kategori sangat Baik.

6) Persentase Penegakan Perda

Dalam Tahun 2023 Indikator Persentase Penegakan Perda adalah 100% target yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah 100%. Jadi persentase capaian dari indikator persentase penegakan perda adalah 100% atau kategori sangat baik.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.44 Perbandingan Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Tahun ini dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	25	35,46	100	
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	20	34,81	60	
3	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang tepat sasaran	40	79,15	100	
4	Cakupan Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	75	24,72	41,66	
5	Capaian Kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik	95	93,70	100	
6	Persentase Penegakan Perda	-	-	100	

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun ini dengan capaian satu tahun terakhir, maka secara umum capaian kinerja pada sasaran Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat ini mengalami peningkatan.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Sasaran Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
1	Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	95	53,49	56,30
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	%	80	38,27	47,84
3	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang tepat sasaran	%	100	73,05	73,05
4	Cakupan Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	%	100	47,13	47,13
5	Capaian Kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik	%	100	100	100
6	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja

Untuk sasaran Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat tahun 2023 Jika dibandingkan dengan target RPJMD ada 1 (satu) indikator yang belum mencapai target.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran Perbandingan Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat ini adalah:

- Adanya dukungan dana
- Adanya dukungan masyarakat dalam proses Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Solusi yang telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Rangka Perbandingan Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sebagai berikut :

- Bekerja sama dengan lembaga-lembaga/ tenaga ahli dalam rangka capaian Sasaran Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Daerah Kabupaten Tana Toraja pada umumnya.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian Sasaran Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat ini adalah sebesar Rp 18.901.125.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 17.698.644.347,- atau 93,64%.

Adapun Program – Program yang mendukung Sasaran Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Rp. 15.547.452.448,- dengan realisasi Rp 15.519.762.448,- atau capaian 99,82%
2. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial Rp. 897.300.000,- dengan realisasi Rp 259.616.917,- atau capaian 28,93%
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik Rp. 762.342.448,- dengan realisasi Rp 714.320.412,- atau capaian 93,70%
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Rp. 3.569.067.552,- dengan realisasi Rp 1.242.300.000,- atau capaian 34,81%
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Rp 615.990.000,- dengan realiasi Rp. 487.563.000 atau capaian 79,15%
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Rp. 971.350.000,- dengan realisasi Rp 240.155.000,- atau capaian 24,72%

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Terwujudnya Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat adalah sebanyak 6 program, yaitu Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan

kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja merupakan perwujudan pertanggungjawaban akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran tahunan sebagai penjabaran dari perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi Capaian rata-rata pelaksanaan 11 sasaran yang mencakup 36 indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebesar **82,94%** atau tergolong dalam kriteria "**baik**". Capaian di atas menunjukkan bahwa Pemda Tana Toraja turut berkontribusi dalam melaksanakan pembangunan secara regional dan nasional.

Namun demikian, dalam tahun 2023 masih terdapat sasaran yang capaiannya masih perlu ditingkatkan yaitu dalam hal Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan, Keterbiban Umum dan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat, dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan sehingga perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dalam tahun 2023.

Beberapa langkah penting untuk memecahkan permasalahan di atas yang sekaligus akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat meningkatkan kinerja yang masih tergolong belum baik.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur pegawai pemerintah dan pengawasan.
- Mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja.

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Pemda Tana Toraja berharap LAKIP Tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban berakuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di masa depan.

Makale, Maret 2024

BUPATI TANA TORAJA

THEOFILUS ALLORERUNG, SE